

**PENGARUH RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
balliq85@gmail.com

Drs. H. Dani Rachman, M.Si.
dani_rachman62@yahoo.co.id

Siti Rodiah, S.Ak
rodiah_siti@gmail.com

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial maupun simultan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Periode 2012-2018. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Rencana Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t Rencana Anggaran memperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $-4,824 > -2,776$ dengan nilai signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$). Kemudian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan uji t Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $4,879 > 2,776$ dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). Secara simultan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, hal tersebut dibuktikan melalui uji F hasilnya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $19,812 > 6,94$ dengan nilai signifikansi 0,008 lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Kata Kunci : Rencana Anggaran, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan oleh Negara untuk mengatur segala keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan agar memberikan dampak positif dan berguna bagi suatu Negara tersebut. Hal ini didukung dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan

**Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah|
Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah**

Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Lembaga Pemerintah pada umumnya dibentuk untuk menjalankan aktivitas pelayanan terhadap masyarakat luas dan sebagai organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan bukan mencari keuntungan tetapi untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan pelayanan tersebut dimasa yang akan datang. Kegiatan pelayanan pemerintahan daerah terhadap masyarakat sering menjadi sorotan publik, karena seiring kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan dari instansi pemerintah tersebut yang dinilai kurang maksimal seperti dalam persoalan pendapatan dan pembelanjaan anggaran sering terjadi kurangnya perencanaan anggaran, pemborosan dana, penyelewengan dana, dan penyelenggaraan administrasi publik yang kurang efisien dan transparan sehingga hal tersebut menimbulkan gejala yang berakar pada ketidakpuasan masyarakat. Kondisi ini mendorong adanya pemeriksaan dalam kinerja keuangan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Dari sekian banyak komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD diyakini bahwa kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh rencana anggaran, dengan alasan yaitu semakin banyak rencana anggaran semakin tinggi pula produktivitas perekonomian dalam kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah dapat meningkatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayanan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk rencana anggaran belanja tersebut. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya.

Oleh karena itu, perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting dilakukan karena dengan begitu kita dapat mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah disetiap tahunnya, sehingga ditahun berikutnya pemerintah dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya. Menurut Abdul Halim dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengatur keuangan daerahnya.

Dibawah ini adalah ringkasan rencana kerja anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung :

Tabel 1
Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung periode 2012-2018

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Anggaran	Perubahan	Persentase Perubahan
2012	185,786		
2013	216,452	30,666	16.51%
2014	237,675	21,223	9.81%
2015	270,702	33,026	13.90%
2016	374,122	103,421	38.20%
2017	354,752	(19,370)	-5.18%
2018	394,041	39,289	11.07%

Sumber :Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung yang telah diolah kembali.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa nilai rencana kerja anggaran dari tahun 2012–2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat dari tahun 2012 dan 2016 mengalami kenaikan, dari tahun 2017 mengalami penurunan, 2018 mengalami kenaikan kembali. Kenaikan tertinggi ada pada tahun 2016 sebesar 38.20% dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar -5.18%.

Dengan adanya perubahan naik turunnya rencana kerja anggaran tersebut, penulis berasumsi bahwa rencana kerja anggaran akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dibawah ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung :

Tabel 2
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung periode 2012-2018

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Realisasi Anggaran	Perubahan	Persentase Perubahan
2012	309,929		
2013	415,786	105,857	34.16%
2014	611,954	196,168	47.18%
2015	675,482	63,528	40.38%
2016	488,057	(37,852)	-7.20%
2017	648,625	160,569	32.90%
2018	709,426	60,800	9.37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diolah kembali.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari tahun 2012–2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat dari tahun 2012 dan 2015 mengalami kenaikan, tahun 2016 mengalami penurunan, 2017-

**Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah|
Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah**

2018 mengalami kenaikan kembali. Kenaikan tertinggi ada pada tahun 2017 sebesar 32.90% dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar -7.20%.

Dengan adanya perubahan naik turunnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, penulis berasumsi bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah akan menentukan naik turunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Fenomena ini merupakan bentuk dari lemahnya perencanaan anggaran pada pemerintah daerah. Tak terlepas dari permasalahan anggaran, kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten bandung, semestinya memerlukan perencanaan anggaran yang baik agar menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) alokasi belanja, maka menyusun setiap kegiatan secara logis dan menyusun anggaran yang berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah pengembangan standar biaya (Fadila). Realisasi anggaran juga perlu dilakukan untuk maksud mencari kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan dalam anggaran tersebut. Realisasi anggaran pada dasarnya adalah proses membandingkan antara anggaran yang disusun dengan pelaksanaannya, sehingga dari perbandingan ini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian terhadap kinerja.

Sehingga dalam penelitian ini perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dikaitkan untuk melihat hubungannya dengan peningkatan kinerja keuangan. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini diantaranya, Penelitian Asmarani (2013) yang menguji pengaruh perencanaan anggaran, pengelolaan kas dan pelaporan, terhadap kinerja kepala SKPD menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaporan dan pengelolaan kas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja kepala SKPD. Penelitian Salbiah (2012) yang menguji pengaruh realisasi anggaran terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel realisasi anggaran berpengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian Suhardi M Anwar, Sumiati (2014) yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil pengujian bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini digunakan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2012-2018”**.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Rencana Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Bagaimana pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

3. Bagaimana pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah

c. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Bale Bandung dan untuk mengetahui pengaruh rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Pengaruh Rencana Anggaran terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

a. Rencana Anggaran

Menurut Suandy (2011:2), mendefinisikan rencana anggaran bahwa : "Perencanaan ialah suatu proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian menyajikannya dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat atau bisa mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh."

Menurut Muhammad Munandar (2012:136), mendefinisikan rencana anggaran bahwa: "Perencanaan diartikan sebagai suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang."

b. Realisasi Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 24, " Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran belanja dan pendapatan daerah entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu".

Sedangkan menurut Dedi Nordiawan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat dan daerah), dalam satu periode pelaporan. "

c. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi kinerja yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2015:14), yang mengungkapkan bahwa: "Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan

**Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah|
Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah**

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.

Menurut Pasolong (2010:176), mengatakan bahwa kinerja merupakan:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Sedangkan menurut S. Munawir (2012:64), pengertian kinerja keuangan adalah:

“Prestasi kerja yang telah diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan terutang dalam laporan keuangan yang bersangkutan”.

Rumus Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Rasio Efektivitas menurut Halim (2009:232) adalah sebagai berikut :

Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD : Target Penerimaan PAD x 100%

d. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (2017:60) mendefinisikan tentang kerangka pemikiran sebagai berikut :

“Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan itu dengan segala macam faktor yang telah atau sudah diidentifikasi yakni sebagai masalah yang penting”.

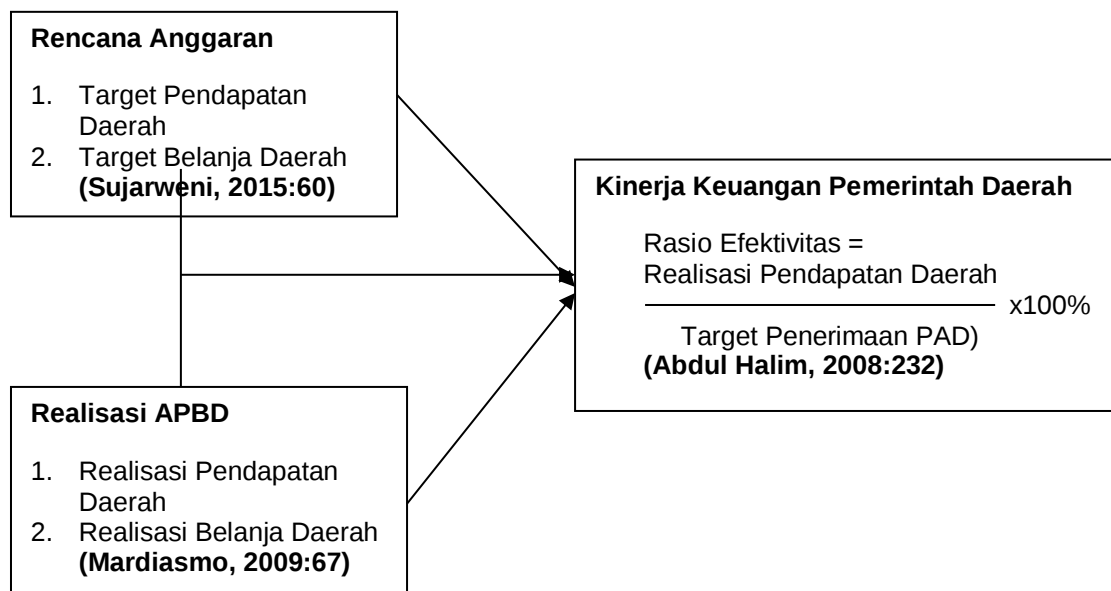
Menurut Sugiyono (2014:224) mendefinisikan tentang kerangka pemikiran sebagai berikut :

“Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.”

Sedangkan menurut Muhamad Idrus (2009:25) mendefinisikan sebagai berikut :

“Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.”

Berikut bagan paradigma penelitian :



Gambar 1
Paradigma Penelitian

e. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan judul penelitiandan konsep hipotesis diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Terdapat Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Diduga Terdapat Pengaruh Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Diduga Terdapat Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

III. Objek dan Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang harus diperhatikan yaitu objek penelitian yang akan diteliti. Dimana terdapat masalah – masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Adapun pengertian objek penelitian menurut Sugiyono (2012:13) dalam buku metode penelitian bisnis, mengemukakan objek penelitian sebagai berikut

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu)”.

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sumber data yang diperlukan adalah Laporan Keuangan Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah 2012 sampai dengan 2018.

b. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, menyatakan bahwa: “Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Sedangkan menurut Suntoyo (2013:19) dalam bukunya Metode Penelitian Akuntansi mengemukakan metode penelitian sebagai berikut :

“Metode penelitian merupakan urutan-urutan proses analisis data yang akan disajikan secara sistematis, karena dengan urutan proses analisis data dapat diketahui secara cepat dan membantu pemahaman maksud dari penelitian tersebut.

Metode penelitian ini meliputi model dan operasionalisasi variabel, dimana model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deskriptif dan verifikatif yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y baik secara masing-masing maupun secara bersama-sama.

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan definisi mengenai variabel-variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari judul yang diteliti, sebagai berikut :

Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah| Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah

Tabel 3
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel independen (X ₁): Rencana Anggaran	Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana penilaian kinerja organisasi sektor publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Sujarweni, V.W (2013)	1. Target Pendapatan Daerah 2. Target Penerimaan Daerah Sujarweni, V.W (2013)	Rasio
Variabel independen (X ₂): Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutannya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat ukur menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Mardiasmo (2009)	1. Realisasi Pendapatan Daerah 2. Realisasi Belanja Daerah Mardiasmo (2009)	Rasio
Variabel dependen (Y): Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja keuangan adalah salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Abdul Halim (2008)	Rasio Efektivitas= (Realisasi Penerimaan PAD : Target Penerimaan PAD) x 100% Abdul Halim (2008)	Rasio

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:275) dalam bukunya "Statistika Untuk Penelitian", mengemukakan bahwa:

"Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2".

Bila dijabarkan secara matematis, bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat (Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah)

X₁ = Variabel bebas (Rencana Anggaran)

X₂ = Variabel bebas (Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

a = Bilangan berkonstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁, X₂ = 0

b₁, b₂ = Koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan tentang adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara X₁ dan X₂ terhadap Y. Analisis koefisien korelasi meliputi koefisien korelasi parsial dan koefisien korelasi ganda.

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan. Menurut Ghazali (2016:98), tujuan koefisien determinasi (R²) pada intinya adalah :

"Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa secara matematis koefisien determinasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2.100\%$$

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

R² = Koefisien Korelasi ganda

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.

2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

d. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:105) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, Kuantitatif Kualitatif dan R&D mendefinisikan:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H_0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel independen dan variabel dependen. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi rencana anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono (2017:230) dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{rp\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rp^2}}$$

Keterangan :

r_P = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} , selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk untuk melihat apakah rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} .

Menurut Sugiyono (2017:235), F_{hitung} dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien korelasi ganda

K = Jumlah variabel independen

n = Jumlah anggota sampel

dk = (n-k-1) derajat kebebasan.

Setelah itu, gunakan kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (*software SPSS*), jika nilai $sig < \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-160.852	40.763		-3.946	.017
Rencana Anggaran	-3.475	.720	-.744	-4.824	.009
Realisasi APBD	17.290	3.544	.752	4.879	.008

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari data di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -160,852 - 3,475 X_1 + 17,290 X_2$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah daerah

X_1 = Rencana Anggaran

X_2 = Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -160,852

Hal ini menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat variabel independen atau rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nilainya 0, maka kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebesar -160,852

2. Koefisien regresi Rencana Anggaran sebesar -3,475

Koefisien regresi (b_1) tersebut hasilnya negatif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang tidak searah, artinya jika nilai variabel rencana anggaran naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar -3,475 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Koefisien regresi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 17,290

Koefisien regresi (b_2) tersebut hasilnya positif, ini menunjukkan adanya indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel realisasi anggaran pendapatan dan

**Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah|
Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah**

belanja daerah naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 17,290 dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Analisis Koefisien Korelasi Parsial

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_1 dengan Y
Correlations

Control Variables			Rencana Anggaran	Kinerja Keuangan
Realisasi APBD	Rencana Anggaran	Correlation	1.000	-.924
		Significance (2-tailed)	.	.009
		Df	0	4
	Kinerja Keuangan	Correlation	-.924	1.000
		Significance (2-tailed)	.009	.
		Df	4	0

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial X_2 dengan Y
Correlations

Control Variables			Realisasi APBD	Kinerja Keuangan
Rencana Anggaran	Realisasi APBD	Correlation	1.000	.925
		Significance (2-tailed)	.	.008
		Df	0	4
	Kinerja Keuangan	Correlation	.925	1.000
		Significance (2-tailed)	.008	.
		Df	4	0

Tabel 7
Hasil Uji Korelasi Ganda (R)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.908	.862	1.06082

a. Predictors: (Constant), Realisasi APBD, Rencana Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

- Korelasi parsial antara Rencana Anggaran dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar -0,924, dari nilai yang diperoleh berarti terdapat korelasi negatif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara tidak searah, artinya jika Rencana Anggaran naik maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan. Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka -0,924. Jika melihat interval koefisien angka -0,924 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X_1 mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.
- Korelasi antara Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,925 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,925. Jika melihat interval koefisien angka 0,925 berada diantara 0,80-1,000 yang berarti variabel X_2 mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.
- Korelasi ganda antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara simultan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0,953. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah secara simultan adalah searah, artinya jika Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) naik, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,953 berada di antara 0,80 - 1,000 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 8
Hasil Uji Korelasi Ganda (R-Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.953 ^a	.908	.862	1.06082

a. Predictors: (Constant), Realisasi APBD, Rencana Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

**Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah|
Muhammad Iqbal, Dani Rachman, Siti Rodiah**

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,908. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai $KD = 0,908$ (90,8%). Artinya, Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 90,8%.

4. Pengujian Hipotesis

Tabel 9
Hasil Uji t (Parsial)
Pengaruh X_1 terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-160.852	40.763		-3.946	.017
Rencana Anggaran	-3.475	.720	-.744	-4.824	.009
Realisasi APBD	17.290	3.544	.752	4.879	.008

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

a. Pengaruh Secara Parsial Rencana Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Rencana Anggaran adalah sebesar -4,824 dengan signifikansi 0,009 sedangkan t_{tabel} dengan dk 7 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($-4,824 > -2,776$) dan taraf signifikansi (0,009) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 diterima H_a ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rencana Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018.

Adanya fluktuatif pada rencana anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018 disebabkan lemahnya perencanaan anggaran dan rendahnya daya serap perencanaan, sehingga dalam pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat dan sulit di realisasikan. Penurunan rencana anggaran periode 2012-2018 terjadi pada tahun 2016, penurunan ini terjadi karena anggaran tidak terealisasikan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional. Dengan demikian anggaran yang didapat oleh instansi akan mengalami penurunan, akan tetapi kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat.

b. Pengaruh Secara Parsial Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel independen Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebesar 4,879 dengan signifikansi 0,008 sedangkan t_{tabel} dengan dk 7 ($n-3 = 7-3$) adalah 2,776 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($4,879 > 2,776$) dan taraf signifikansi (0,008) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) secara

parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018.

Adanya fluktuatif pada realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018 adalah karena rencana penyerapan anggaran belanja belum terproyeksi dengan baik. Penurunan realisasi pendapatan dan belanja daerah selama periode 2012-2018 terjadi pada tahun 2015-2016 dimana penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2016 disebabkan karena adanya selisih yang semakin besar antara rencana anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Terjadinya selisih anggaran belanja dengan realisasinya bersumber dari upaya penghematan belanja, adanya belanja yang tidak dapat dieksekusikan, tidak relevannya satuan biaya yang digunakan dalam penganggaran, keterlambatan penyampaian dokumen, sehingga anggaran tidak dapat diserap secara 100%.

c. Pengaruh Secara Simultan Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 8
Hasil uji F (Simultan) Pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	44.589	2	22.295	19.812	.008 ^a
Residual	4.501	4	1.125		
Total	49.091	6			

a. Predictors: (Constant), Realisasi APBD, Rencana Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Dari tabel 8 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 19,812, sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 4 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,008, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 6,94. Karena F_{hitung} lebih besar dari pada F_{tabel} ($19,812 > 6,94$) dan taraf signifikansi yaitu ($0,008 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yang terdiri dari Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018.

Dari periode 2012-2018 instansi mengalami fluktuatif, penurunan yang terjadi dari periode 2012-2018 adalah ada di tahun 2016. Ini diakibatkan karena rencana anggaran yang tidak efektif dan tidak terealisasi yang berdampak pada kinerja dan menggagalkan program yang telah disusun sebelumnya.

V. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018. Artinya setiap kenaikan atau penurunan rencana anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, oleh sebab itu setiap rencana anggaran yang dikeluarkan meningkat dan tidak terealisasi maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami penurunan.
2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018. Artinya setiap kenaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah akan diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan kinerja keuangan efektivitas, dimana efektivitas merupakan selisih antara realisasi penerimaan PAD dibagi target penerimaan PAD dikali 100%, maka faktor realisasi pun akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga meskipun realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah meningkat, namun target penerimaan kecil maka kinerja keuangan pemerintah daerah tetap bisa meningkat, begitupun sebaliknya apabila realisasi penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah menurun, namun target penerimaan besar maka kinerja keuangan pemerintah daerah pun akan menurun.
3. Secara simultan, variabel bebas yaitu rencana anggaran dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan variabel terikat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah periode 2012-2018.

Daftar Pustaka

- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2013. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir, 2011. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2009. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

- Nordiawan, Ayuningtya. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung :Alfabeta.
- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2017. Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian. Jakarta : Salemba Empat.
- Simamora, Henry. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:STIE YKPN.
- Suandy. 2011. Perencanaan Anggaran Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.
- Suntoyo. 2013. Metode Penelitian Akuntansi. Bandung : PT. Rafika Aditama Anggota Ikapi.
- Sumarsan, Thomas. 2013. Perpajakan Indonesia, Edisi ketiga. Jakarta : PT. Indeks. .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 19 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah.